

RAHASIA

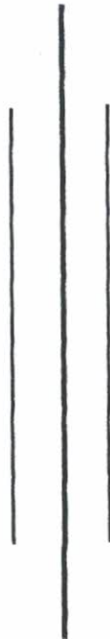
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI

MILITARY
DINAS SURVEY

PETUNJUK LAPANGAN
NOMOR : JUKLAP/1253/X/1998/HID

TENTANG

**OPERASI PENANGGULANGAN HURU-HARA
DI DISHIDROS**



Jakarta, 01 Oktober 1998

RAHASIA

TERBATAS

MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI

PETUNJUK LAPANGAN
NOMOR : JUKLAP/1253 / X /1998 /HID

TENTANG
OPERASI PENANGGULANGAN HURU HARA
DI DISHIDROS

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Dinas Hidro-Oceanografi (Dishidros) TNI-AL adalah badan pelaksana pusat TNI-AL yang berkedudukan langsung dibawah Kasal yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan Hidro-Oceanografi yang meliputi Survei, Pemetaan laut, Penelitian, Publikasi, Penerapan lingkungan laut, dan Keselamatan Navigasi Pelayaran baik untuk kepentingan ABRI maupun kepentingan umum.
- b. Kantor Dishidros berlokasi didaerah Ancol Jakarta Utara dengan alamat Jalan Pantai Kuta V/I Ancol Timur Jakarta Utara nomor Telepon 684810 Fax 684819 terpisah dari Markas Besar TNI-AL (Mabesal) yang berlokasi di Cilangkap Jakarta Timur dengan alamat Jalan Mabes Hankam Cilangkap Jakarta Timur.
- c. Dengan terpisahnya kantor Dishidros diluar kantor induk Mabesal dan untuk menjaga terpeliharanya keamanan kantor Dishidros dan sekitarnya maka telah dibentuk Pasukan Huru hara sebanyak 2 (dua) satuan setingkat peleton (SST) minus yang bertugas mengamankan dan menyelamatkan Dishidros dan sekitarnya dari gangguan yang mungkin terjadi. Disamping untuk pengamanan Dishidros dan sekitarnya, pasukan ini dapat diperbantukan di satuan lain bila diperlukan sebagai pasukan pengaman tidak langsung atas koordinasi dan permintaan dari satuan lain yang mengendalikan Pamsung didaerah Jakarta Utara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan Juklap ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan penanggulangan huru-hara dilapangan dengan tujuan agar tercapai keseragaman dan keberhasilan dalam rangka mengatasi berbagai bentuk huru hara.

/3. Ruang lingkup.....

TERBATAS

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini meliputi organisasi satuan PHH, pelaksanaan penanggulangan, Komando Pengendalian dan dukungan administrasi personil PHH.

4. Landasan.

- a. Skep Menhankam / Pangab Nomor Skep/125/I/1979 tanggal 31 Januari 1979 tentang petunjuk lapangan penindakan Huru hara (Dakhura) ABRI.
- b. Skep Pangab Nomor. Skep / 658 / X / 1996 tanggal 07 Oktober 1996 petunjuk lapangan ABRI tentang Operasi penanggulangan Huru hara.

5. Pengertian-pengertian

- a. Huru-hara adalah tindakan atau perbuatan Pidana yang dilakukan oleh sekelompok massa secara bersama-sama dengan sengaja dan tidak terbuka dalam bentuk ancaman kekerasan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Unjuk Rasa adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk menyatakan aspirasinya di depan umum dengan cara lisan, tulisan, maupun cara lainnya, untuk menyampaikan dukungan, protes atau tuntutan, sebagai perwujudan ikut serta dalam proses mengisi pembangunan nasional, terutama dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
- c. Massa adalah sekelompok orang yang secara aktif dan konsisten mengikuti setiap gerakan yang diarahkan oleh pimpinan massa tanpa mengindahkan seruan ataupun perintah dari pihak lain.
- d. Aman adalah suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat dimana konflik massa bersifat laten, dimana administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik.
- e. Rawan adalah suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat dimana konflik telah meninggalkan stadium laten, yang ditandai dengan timbulnya keresahan-keresahan sosial yang mana kondisi tersebut menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.
- f. Gawat adalah suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat dimana konflik-konflik telah berkembang dari keresahan-keresahan sosial menjadi ketegangan-ketegangan sosial yang disertai berbagai isu-isu, aksi-aksi fisik, kebringasan sosial yang mengganggu atau mengancam stabilitas nasional.
- g. Konflik adalah suatu persengketaan antara dua pihak atau lebih akibat/perbedaan kepentingan, meliputi spektrum yang meluas mulai dari perbedaan pendapat sampai dengan perwujudan perang.
- h. Krisis adalah suatu keadaan gawat atau darurat yang mengancam stabilitas nasional, identitas, integritas, dan eksistensi bangsa, terjadi sebagai kulminasi dari konflik yang diwarnai oleh adanya pertentangan terbuka dan tindakan anarkhi dengan ciri kekerasan serta pelecehan hukum, dapat terjadi mendadak atau eskalatif yang tidak teratasi dengan tata cara penanggulangan berdasar ketentuan/prosedur biasa.

/6.Sistematika.....

6. Sistematika/Tata Urut

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Organisasi Satuan PHH Dishidros
- c. Bab III Pelaksanaan Penanggulangan Huru Hara
- d. Bab IV, Komando dan Pengendalian
- e. Bab V Dukungan Administrasi
- f. Bab VI Penutup

BAB II
ORGANISASI SATUAN PHH DISHIDROS

1. Umum

Organisasi Satuan PHH Dishidros disusun untuk pengamanan wilayah Dishidros sendiri dan sekitarnya. Susunan Satuan PHH Dishidros terdiri dari Dalops, Satuan PHH dan Satuan Bantu dimana kekuatan personil didukung dari anggota Dishidros, peralatan dan perlengkapan - nya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta menggunakan fasilitas yang ada dikesatuan.

2. Organisasi Satuan PHH Dishidros (Struktur Organisasi terlampir)

a. Dalops

Dalops terdiri dari Pamen yang telah ditunjuk, bertempat di Posko dan bertugas sebagai pengendali operasi dalam rangka penindakan Huru Hara.

b. Satuan PHH

Satuan PHH Dishidros dalam rangka penindakan Huru Hara terdiri dari :

1) Dua peleton sebagai peleton inti dimana tiap-tiap peleton terdiri dari :

- a) Danton
- b) Danru I
- c) Wadanru I
- d) Danru II
- e) Wadanru II
- f) Danru III
- g) Wadanru III

2) Dua peleton sebagai cadangan dimana tiap-tiap peleton terdiri dari :

- a) Danton
- b) Danru I
- c) Wadanru I
- d) Danru II

/e).Wadanru II.....

- e) Wadanru II
- f) Danru III
- g) Wadanru III

3) Pengamanan dan Provost

a) Pengamanan

- (1) Mencari informasi tentang lawan meliputi unsur pimpinan, kelompok masa, jenis tuntutan, bentuk aksi, obyek serta sasaran dan sebagainya.
- (2) Menginformasikan tentang rute yang aman untuk satuan PHH dan kemungkinan hambatan.
- (3) Melakukan penggalangan terhadap masyarakat untuk mengimbangi usaha golongan/otak perencana huru-hara.
- (4) Menggalang personil/kelompok tertentu ditengah masa yang sedang melakukan unjuk rasa.
- (5) Berpakaian preman, sesuai dengan situasi dan kondisi tugas.

b) Provost.

- (1) Mengadakan patroli sekitar wilayah kesatuan.
- (2) Mencari dan mengumpulkan bukti - bukti sesuai dengan ketentuan hukum.
- (3) Mengamankan tahanan, pengawalan VIP dan sebagainya.
- (4) Tugas-tugas lain atas perintah

c. Satuan Bantu :

1) Kesehatan terdiri dari:

- a) Dan Unit/Dokter
- b) Ba Keslap
- c) Ta Keslap

Dengan tugas sebagai berikut :

- (a) Melakukan perawatan kesehatan dilapangan bagi satuan PHH
- (b) Melakukan perawatan terbatas bagi luka dan sebagainya.
- (c) Melakukan evakuasi korban.

2) Logistik

Untuk mendukung terselenggaranya operasi penanggulangan Huru hara Dishidros diperlukan kerja sama antara logistik, Proga dan Pekas dalam rangka mendukung logistik. Dalam pelaksanaannya dapat dibentuk suatu unit yang terdiri dari :

- a) Dan Unit.
- b) Ba Perbekalan
- c) Ba Peralatan

/3).Komunikasi.....

3) Komunikasi

Untuk memperlancar komunikasi dalam rangka operasi penanggulangan Huru hara di Dishidros diperlukan kerja sama antara Satsurvei, Subdis Survei dan Veranaütikas. Dalam pelaksanaannya dibentuk suatu unit yang terdiri dari :

- a) Dan unit
- b) Ba/Ta Operator
- c) Ba/Ta Montir Radio
- d) Ba/Ta Komunikasi

4) Angkutan

Untuk mempercepat dan mempermudah jalannya operasi penanggulangan Huru hara diperlukan sarana transportasi dalam pelaksanaannya dapat dibentuk suatu unit yang terdiri dari:

- a) Ba Angkutan/Kapool
- b) Ba/Ta Pengemudi
- c) Ba/Ta Bengkel

5) PMK (Pemadam Kebakaran)

Untuk menanggulangi kebakaran saat terjadinya Huru hara yang anggotanya terdiri dari :

- a) Kelompok pemadam
- b) Kelompok pengaman
- c) Kelompok penyelamat.

BAB III PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HURU HARA

1. Umum

Penanggulangan Huru hara bertujuan untuk membubarkan massa yang berkumpul agar tidak berkembang kearah huru hara dengan cara membubarkan masa menangkap para pemimpin / penggerak, menangkap para pelaku tindak pidananya. Mencegah massa memasuki daerah tertentu atau mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Untuk itu diperlukan tindakan yang bijaksana sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada waktu itu.

Untuk mengatasi penanggulangan Huru hara Dishidros dan sekitarnya melalui beberapa tahapan yaitu pendahuluan, pelaksanaan dan pengakhiran. Pada tahap pelaksanaan merupakan tahap inti bagian pokok dari penanggulangan huru hara, adapun keberhasilannya akan sangat tergantung pada keberhasilan tahap perencanaan dan tahap persiapannya.

/2.Tahap.....

2. Tahap Pendahuluan

Sebelum melaksanakan operasi penanggulangan huru hara pimpinan pasukan/Dalops membuat langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mempelajari tugas (analisis tugas pokok)
- 2) Mengumpulkan keterangan
- 3) Membuat rencana
 - a) Rencana penggunaan waktu
 - b) Rencana penyusunan dan penempatan pasukan
 - c) Rencana pemindahan/penggeseran pasukan
- 4) Pelaksanaan pengintaian/penyelidikan
- 5) Melaksanakan koordinasi
- 6) Menyempurnakan rencana sementara
- 7) Mengeluarkan perintah
- 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian

Seorang pimpinan pasukan PHH perlu membuat langkah-langkah perencanaan yang baik dan selalu mengikuti perkembangan situasi didalam masyarakat melalui media masa sebagai bahan penerangan kepada pasukannya. demikian juga ia harus mengenal medan dengan baik, mengetahui dimana letak jalan pendekat utama, cadangan dan pengganti untuk mempercepat dan mengefektifkan kearah sasaran, sesuai wilayah rayonisasi kesatuan.

Pada tahap ini dilakukan pula rencana penggunaan alat khusus alternatif tindakan serta rencana untuk menemukan dan menangkap pimpinan atau penggerak masa yang berperan sebagai biang kendali Huru hara.

Untuk mendapatkan informasi tentang calon massa perusuh, unsur pengamanan, provost dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat jauh sebelum Huru hara terjadi.

3. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan akhir persiapan pasukan
- b. Pengeluaran perintah, penegasan ulang prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku hal-hal yang boleh bila dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan.
- c. Pemindahan pasukan mendekati sasaran/daerah persiapan.
- d. Melaksanakan kegiatan didaerah persiapan sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan informasi yang terakhir
 - 2) Pengintaian medan jika diperlukan
 - 3) Pengeluaran perintah terakhir
 - 4) Pemeriksaan terakhir kesiapan pasukan dan alat peralatan
 - 5) Penyusunan pasukan

/4.Tahap.....

4. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penanggulangan Huru hara selalu harus berpegang teguh pada prinsip prinsip asas - asas PHH agar tujuan penanggulangan dapat dicapai tanpa menimbulkan kerugian/korban yang tidak diharapkan dalam penanggulangan Huru hara perlu disadari bahwa korban yang timbul dapat merangsang tindakan kekerasan dari massa atau terjadinya huru-hara yang lebih berat sebagai sikap protes. Dengan demikian tindakan pokok dalam penanggulangan Huru hara adalah mengenal medan, menyusun formasi satuan PHH dalam rangka mencegah masa menimbulkan korban / kerugian selanjutnya menemukan dan menangkap oknum-oknum pimpinan/penggerak sebagai biang keladi terjadinya Huru hara.

Penanggulangan operasi Huru hara di Dishidros wilayahnya sesuai rayonisasi disekitar Dishidros dan pelaksanaannya dibentuk suatu pos - pos atau ring-ring sesuai wilayah pengamanan tiap-tiap pos / ring ditempatkan personil dari satuan PHH, juga disiapkan personil di Posko untuk mengantisipasi sewaktu - waktu dipos / ring minta bantuan personil/tidak bisa mengatasi. Dalam rangka membantu pengamanan tersebut anggota provost mengadakan patroli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sedangkan untuk anggota Pam mencari informasi informasi dan koordinasi dengan aparat setempat dan kepolisian terdekat atau Kapolres.

Adapun tindakan - tindakan satuan PHH dilakukan dengan cara membentuk formasi formasi tertentu dan menggunakan alat peralatan Dakhura sesuai yang ada dikesatuan, juga satuan PHH melakukan tindakan-tindakan penyadaran, penutupan, penyaluran, pendorongan/ penggiringan, pemisahan, penerobosan, pengawalan, pembubaran, pembersihan dan konsolidasi. Tindakan tindakan tersebut dilaksanakan pada tahapan preventif, represif dalam rangka preventif atau represif penuh.

5. Tahap Pengakhiran

Pengakhiran adalah tindakan - tindakan terakhir satuan PHH sebelum kembali kepangkalan atau disiagakan kembali ditempat tertentu setelah selesai tugas penanggulangan Huru hara.

Hasil pemeriksaan dalam konsolidasi dilaporkan melalui radio ke Komando atas, kemudian disusun laporan tertulis secara rinci. Isi laporan diantaranya kerugian dikedua belah pihak dan lingkungan serta permintaan pengisian personil dan alat/perlengkapan yang rusak, habis terpakai dan lain sebagainya.

Sebelum kembali kepangkalan, dilakukan breafing dan pengeluaran perintah yang diperlukan dalam rangka menyiagakan kembali satuan PHH, termasuk rencana latihan dan koreksi terhadap kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Meminta petunjuk ke Komando atas dan melaporkan kesiapan untuk kembali kepangkalan.

/6. Penggantian.....

6. Penggantian.

Adakalanya suatu huru hara berlangsung dalam waktu cukup lama sehingga satuan PHH menjadi lemah karena lelah, lapar, haus serta timbul ketegangan mental. Untuk mempertahankan efektifitas penanggulangan, perlu dilakukan penggantian dengan satuan PHH yang baru.

BAB IV
KOMANDO DAN PENGENDALIAN

1. Umum

Operasi penanggulangan Huru hara adakalanya menjadi sangat rumit disamping karena massa sangat rapat dengan PHH, juga kemungkinan besar Huru hara bisa terjadi di beberapa lokasi secara simultan, sehingga komando dan pengendalian satuan PHH menjadi sulit. Kegagalan penyelenggaraan Kodal dapat berakibat tidak tercapainya tujuan operasi, oleh karena itu penentuan wewenang pengerahan, prosedur pengerahan, pentahapan pelibatan satuan PHH dan wewenang Kodal serta sarana Kodal perlu ditata dengan baik. Komando dan pengendalian di Dishidros dibawah Kadishidros/Sekdishidros dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pamensia sebagai pengendali operasi yang bertempat di Posko (Ruang operasi Dishidros).

2. Wewenang Pengerahan.

Pada dasarnya penanganan terhadap Huru hara adalah menjadi wewenang Polri. Mengingat massa yang dihadapi adalah warga negara sendiri, maka diperlukan suatu penanganan secara bijaksana dan tetap berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Secara tegas aturan perundang undangan dinegara RI menetapkan bahwa Polri merupakan alat negara penegak hukum yang bertanggung jawab bagi terwujudnya tertib hukum dan ketentraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya penanganan huru hara setiap kepala kepolisian kewilayahan/Kapolres berwenang mengerahkan dan menggerakkan seluruh satuan PHH POLRI maupun satuan PHH ABRI lainnya yang berada di wilayah masing-masing.

Untuk satuan PHH Dishidros dapat digerakkan sesuai dengan kewenangan Komando pimpinan Dishidros/Kadishidros setelah koordinasi / laporan dengan instansi terkait dan berpedoman kepada prosedur permintaan bantuan ataupun protap tersendiri yang mengatur pelibatan unsur TNI dalam penanggulangan Huru hara/kerusuhan massa.

3. Prosedur Pengerahan

Pengerahan satuan PHH Dishidros hanya terbatas pada wilayah Dishidros dan sekitarnya sesuai rayonisasi dan juga bertugas sebagai Pamtaksung. Dalam pelaksanaannya ditempatkan di pos - pos yang sudah ditentukan pada wilayah tersebut, sedangkan peleton yang lainnya / cadangan siap diposko sewaktu-waktu membantu pengamanan bila dibutuhkan dan semua kegiatan dikendalikan oleh Dalops/Pasko.

/4.Wewenang.....

TERBATAS

4. Wewenang Dalops

Selama tindakan pengamanan yang dilakukan satuan PHH Dishidros selaku penanggung jawab Dalops wilayah Dishidros dan sekitarnya masih bisa dilaksanakan maka wewenang Dalops tetap berada ditangan Kadishidros. Namun apabila tindakan pengamanan sudah tidak mungkin bisa dilakukan karena tingkat kerusakan sudah mengancam stabilitas nasional, maka Kadishidros melaporkan kepada Mabesal / Kasal tentang situasi yang terjadi dan menunggu arahan lebih lanjut.

5. Sarana Dalops

Untuk menjamin efektifitas Dalops pada tahap perencanaan, persiapan maupun tahap dinamika, selain diperlukan piranti lunak berupa Protap dan konsinyes tersendiri, juga diperlukan adanya piranti keras yang meliputi sarana Dalops berupa peralatan personil PHH, HT, pengeras suara, isyarat visual, radio mobil, dan peluru isyarat, serta sarana lainnya yang dapat memperlancar Dalops.

BAB V

DUKUNGAN ADMINISTRASI

1. Umum

Dukungan administrasi bagi satuan PHH Dishidros dilaksanakan melalui jalur khusus. Jalur dukungan khusus untuk mengisi kebutuhan yang tidak terdapat pada dukungan rutin (organik) atau karena dukungan rutin tidak dapat mencukupi kebutuhan satuan PHH.

2. Personil.

Satuan PHH Dishidros disusun dari anggota organik Dishidros yang berdinasi di Staf, mengingat personil kapal-kapal bertanggung jawab atas kapalnya masing-masing dan sewaktu waktu berlayar untuk operasi Survei. Tetapi untuk Pamen siaga / Dalops dilibatkan seluruh Pamen Dishidros.

3. Logistik

a. Alat Perlengkapan Organik

- 1) Satuan PHH Dishidros menggunakan alat perlengkapan sesuai yang ada disatuan.
- 2) Dukungan alat perlengkapan organik melalui prosedur mengajukan permintaan ke Denma Mabesal mengingat Dishidros merupakan suatu badan pelaksana pusat Mabes TNI-AL.
- 3) Dipertanggung jawabkan sebagai alat perlengkapan organik seperti alat perlengkapan organik lainnya.

/b. Alat

TERBATAS

b. Alat Perlengkapan Khusus PHH ,

- 1) Disalurkan melalui jalur khusus, selanjutnya menjadi tanggung jawab Dan Satma untuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatannya.
- 2) Walaupun prosedur tanggung jawab sama dengan alat peralatan organik lainnya, namun diatur dalam administrasi tersendiri.
- 3) Semua alat peralatan PHH harus terpelihara dalam kondisi siap pakai.

c. Dukungan perawatan makan dan kesehatan satuan

Pada prinsipnya dukungan makan dan kesehatan diselenggarakan oleh satuan sendiri, sedangkan pada saat bertugas selaku satuan PHH dilapangan untuk dukungan makan dan kesehatan disiapkan oleh logistik, progar, dan pekas.

BAB VI
PENUTUP

Buku petunjuk lapangan operasi penanggulangan Huru hara ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, masukan dan hal hal yang baru terjadi dilapangan dan belum diatur didalam buku petunjuk ini akan diatur tersendiri.

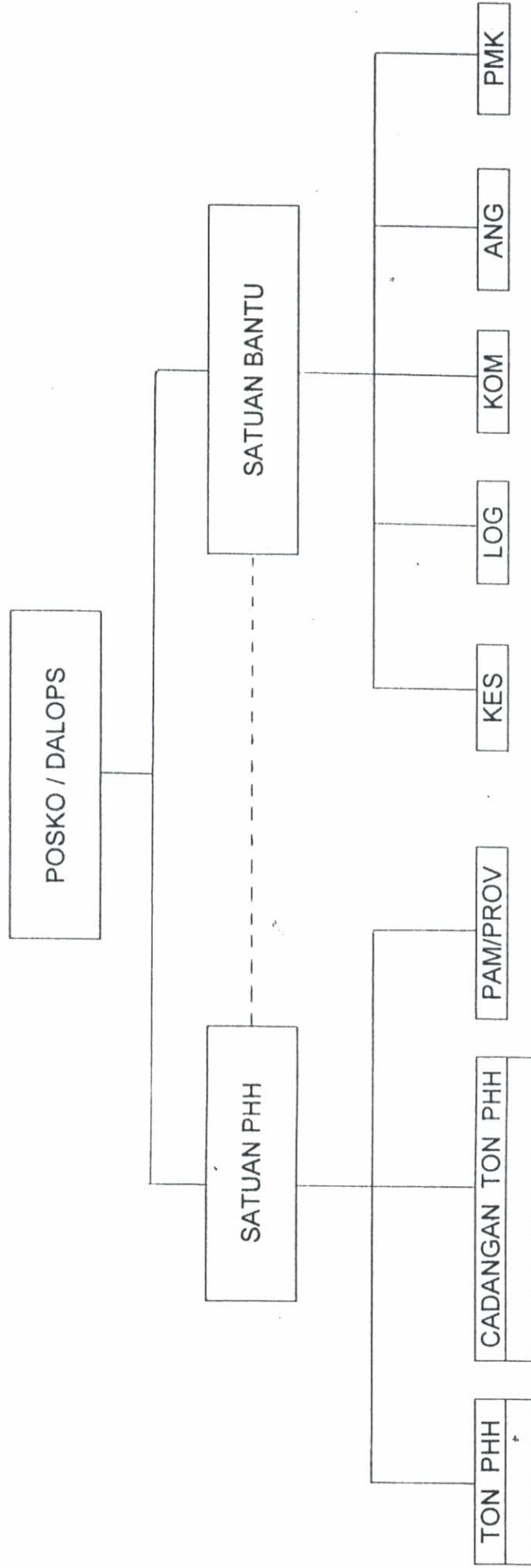
Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 0 1 OCT 1998

KEPALA DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI

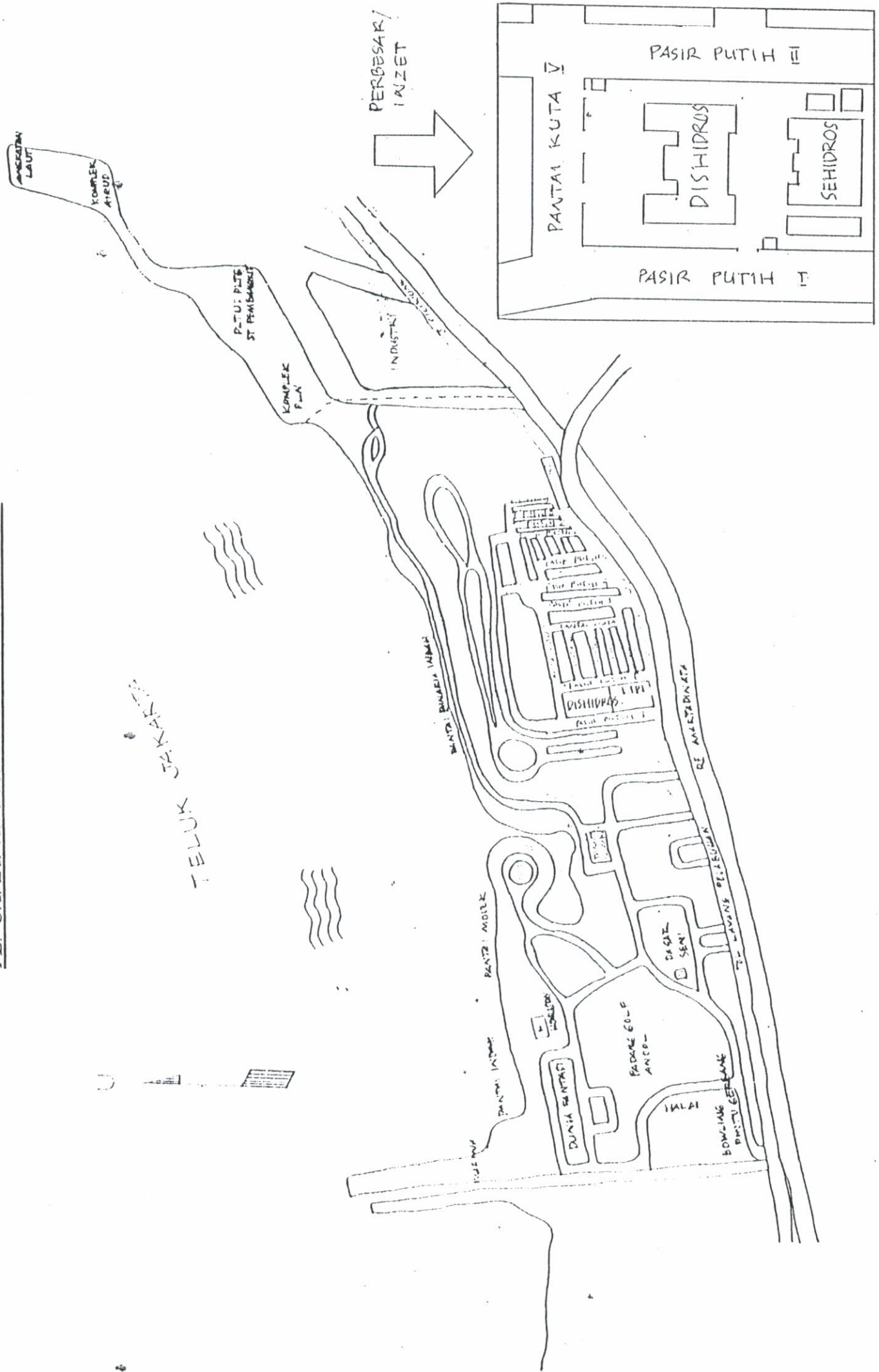


NICOLAS P. ELLO
LAKSAMANA PERTAMA TNI

STRUKTUR ORGANISASI PHH DISHIDROS



DENAH LOKASI PENGAMANAN DISHIDROS DAN SEKITARNYA



TELETYPE



KEY.